

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUM PERHUTANI DAN LEMBAGA
MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
(Studi Pada Program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)**

Verinnasthasia Elvirandini

S1 Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
verinnawinandra@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP.

S1 Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Kondisi hutan yang semakin memprihatinkan saat ini membuat pemerintah harus melakukan suatu upaya agar angka kerusakan hutan tidak semakin bertambah dengan cara menerapkan sistem agroforestri. Salah satu daerah yang menerapkan sistem agroforestri adalah Kabupaten Bojonegoro yang dalam penerapannya menggunakan *silvopastura*. Penerapan *silvopastura* ini diwujudkan dalam suatu program yakni Pengelolaan Hutan Silvopastura Sapi (Paha Sylpi) dimana program ini dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Peternakan dan Perikanan, Perum Perhutani KPH Bojonegoro, dan LMDH Wana Manunggal I. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori kerjasama menurut Keban (2009) yang memiliki tujuh prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektifitas, konsensus, serta saling menguntungkan dan menghargai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan dapat diketahui dari proses pemilihan partner, penyediaan sumber daya, serta proses bagi hasil. Akuntabilitas dapat dilihat dari pertanggungjawaban ketiga pihak yang bekerjasama. Partisipatif menunjukkan peran dari masing-masing aktor yang terlibat. Efisiensi program dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara rutin. Efektifitas dapat dilihat dari perubahan yang terjadi selama program Paha Sylpi dilaksanakan. Konsensus yang dilakukan dapat diketahui melalui koordinasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saling menguntungkan dan menghargai dapat melihat keuntungan dan manfaat yang didapat dari penerapan program Paha Sylpi. Saran yang diberikan peneliti adalah harus ada penambahan luas lahan yang digunakan sebagai media tanam hijauan pakan ternak dan pembuatan dokumen perjanjian kerjasama agar peran dan tanggung jawab ketiga pihak yang bekerjasama dapat diketahui dengan jelas.

Kata Kunci :Kerjasama, Pemerintah Daerah, Hutan

Abstract

Forest condition that increasingly concern the current Government should do to make an effort so that numbers are not growing destruction of forest by means of applying the agroforestry system. One of the areas that apply the agroforestry system is Bojonegoro which in its implementation using *silvopastura*. The implementation of *silvopastura* is realized in the program called Forest Management and Cow Silvopastura (Paha Sylpi) where the program is implemented through cooperation between the Office of Animal Husbandry and Fisheries, Perum Perhutani KPH Bojonegoro, and The Institution of Village Community Forest (LMDH) Wana Manunggal I. This research means to describe the implementation of Paha Sylpi in Setren Village, Ngasem Sub-district, Bojonegoro. The research method used is descriptive research method with qualitative approach. While the focus of this research using cooperation theories from Keban (2009) which has seven principles includes transparent, participatory, accountability, efficiency, effectiveness, consensus, mutual benefit and respect. Data collection techniques used as interview, observation, and documentation. Data analysis used by data collection, data processing, data presentation, and conclusion. The results of this study showed that the transparency that is done can be known from the partner selection process, provision of resources, as well as the outcome sharing. Accountability can be seen from the third-party liability in collaboration. The participatory role of each actor involved. Efficiency programs is done through monitoring and evaluation on a regular basis. Effectiveness can be seen from the changes that occur during the Paha Sylpi program was implemented. Consensus can be done through coordination in solving the case. Mutual benefit and respect can see profits and benefits gained from

the implementation of the Paha Sylpi Program. Advice that can be given of researchers is a must have addition of land area that used as a medium for planting forage fodder and quickly create document cooperation agreement so that the roles and responsibilities of third parties collaborating can be clearly known.

Keywords : Cooperation, Local Government, Forest

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu kawasan yang memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem sehingga keberadaannya perlu untuk dilestarikan. Akan tetapi, kondisi hutan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan dimana luas wilayah hutan selalu berkurang setiap tahunnya yang disebabkan karena kehilangan tutupan hutan alam (Deforestasi). Deforestasi dapat terjadi karena adanya perubahan fungsi lahan hutan menjadi kawasan pemukiman, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta pemanenan hasil kayu yang digunakan sebagai bahan baku industri. Terjadinya deforestasi ini akan memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Dengan banyaknya ancaman yang muncul dalam melestarikan keberadaan hutan yang terus meningkat di setiap tahunnya membuat pemerintah harus melakukan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan kehutanan tersebut agar angka deforestasi tidak semakin bertambah. Pemanfaatan hutan ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem agroforestri. Sistem agroforestri sendiri merupakan salah satu sistem penggunaan lahan dengan cara menggabungkan antara komponen kehutanan dengan komponen lainnya seperti pertanian atau peternakan.

Salah satu daerah yang menerapkan sistem agroforestri dalam mengelola kawasan hutannya adalah Kabupaten Bojonegoro dimana kabupaten tersebut terkenal akan potensi kehutanannya berupa kayu jati dengan kualitas unggul. Akan tetapi saat ini wilayah hutan di Kabupaten Bojonegoro kondisinya semakin memprihatinkan yang disebabkan karena kebakaran hutan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Yang terparah dan menyebabkan lahan menjadi kritis adalah ketika penebangan liar pada tahun 2000.

Untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dihadapi maka pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Bojonegoro dalam mengelola kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kerjasama yang dilakukan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha yang dilandasi oleh *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 16/MOU/DIR/2015 dan 188/07/412.11/2015 Tentang Sinergitas Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Ruang lingkup kesepakatan tersebut adalah (1) Industri wisata, (2) Tanaman pangan dan obat-obatan, (3) Tanaman energi, (4) Peternakan dan hijauan pakan ternak, (5) Sarana dan prasarana dan jaringan listrik, (7) Arboretum, dan (8) Perlindungan dan pelestarian sumber daya alam serta kawasan masyarakat adat.

Berlandaskan MoU yang dilakukan antara Bupati Bojonegoro dengan Direktur Utama Perum Perhutani maka terbentuklah sebuah inovasi yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengelola hutan di Kabupaten Bojonegoro yakni Program Pengelolaan Hutan Silvopastura Sapi (Paha Sylpi) dimana melibatkan peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pelaksanaannya. Paha Sylpi adalah suatu program yang menerapkan sistem agroforestri dengan jenis *silvopastura* dalam penerapannya. Sistem *silvopastura* adalah suatu sistem agroforestri yang menggabungkan antara komponen kehutanan dan komponen peternakan dimana hal tersebut masuk kedalam ruang lingkup kesepakatan pada MoU yakni peternakan dan hijauan pakan ternak yang dikembangkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan serta Perum Perhutani. Program Paha Sylpi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan serta hasil ternak sapi potong di Kabupaten Bojonegoro. Program ini lahir karena adanya masalah yang terjadi di sektor kehutanan dan sektor peternakan. Permasalahan yang terjadi di sektor peternakan sendiri menurut Soeprapto dan Abidin (2006 : 7 – 12) diantaranya (1) Produktifitas yang rendah, (2) Populasi yang rendah, (3) Pasokan sapi bakalan tidak stabil, (4) Pasokan pakan ternak belum mencukupi, (5) Pengetahuan tentang teknologi peternakan masih rendah, dan (6) perkawinan tidak terkontrol.

Penerapan program Paha Sylpi sendiri dilakukan di kawasan desa pinggir hutan sehingga diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu meningkatkan perekonomian peternak pinggir hutan di Kabupaten Bojonegoro. Desa yang dipilih untuk menerapkan program ini adalah Desa Setren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Alasan yang mendasari desa tersebut dipilih karena kawasan hutan di desa tersebut merupakan kawasan yang sangat tandus dan setiap kali ditanami pohon jati tidak pernah berhasil karena sumber air dan unsur hara tanah yang sangat rendah. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat mengembalikan produktifitas hutan serta dapat meningkatkan produktivitas sapi untuk memenuhi permintaan masyarakat akan daging tanpa memasok dari daerah lain. LMDH yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah LMDH Wana Manunggal I.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penting untuk mengkaji kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan LMDH Wana Manunggal dalam mengelola hutan di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan Prinsip Kerjasama sehingga dapat diketahui pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan yakni kembalinya lahan hutan kritis menjadi lahan produktif

serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pengembangan kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro melalui program Paha Sylpi. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan LMDH Wana Manunggal dalam mengelola hutan dengan judul penelitian **“Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, Fokus penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Bojonegoro dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dan LMDH Wana Manunggal I Desa Setren dalam mengelola hutan melalui program Paha Sylpi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, Perum Perhutani KPH Bojonegoro, serta LMDH Wana Manunggal I merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan BUMN (KPBU) dimana melibatkan peran masyarakat didalamnya. Kerjasama yang dilakukan ini merupakan integrasi antara sektor peternakan dan sektor kehutanan yang diimplementasikan dalam bentuk suatu program yakni Pengelolaan Hutan Silvopastura Sapi (Paha Sylpi) yang diluncurkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2015.

Program Paha Sylpi dilaksanakan berdasarkan pada MoU yang dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani dengan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 16/MOU/DIR/2015 dan 188/07/412.11/2015 Tentang Sinergitas Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Program tersebut termasuk kedalam ruang lingkup kesepakatan kerjasama pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk peternakan dan hijauan pakan ternak. Program ini merupakan program pengembangan teknologi pengelolaan hutan menggunakan sistem agroforestri khususnya jenis *silvopastura*. Pengembangan agroforestri sendiri merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh Perum Perhutani dimana untuk sistem *silvopastura* sendiri masih sangat jarang diterapkan.

Guna mengetahui pelaksanaan Program Paha Sylpi yang merupakan program kerjasama yang dilakukan antara Dinas Peternakan dan Perikanan, Perum Perhutani KPH Bojonegoro, serta LMDH Wana Manunggal I peneliti menggunakan pendekatan *Public Privat Partnership* dengan indikator kedua yakni *Cooperation/Collaboration* (Kerjasama) dimana

memiliki tujuh prinsip menurut Keban (2009) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efektifitas, Efisiensi, Konsensus, serta Saling Menguntungkan dan Menghargai. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum bisa menggambarkan peran BUMN yang dalam hal ini adalah Perum Perhutani KPH Bojonegoro dalam pelaksanaan Program Paha Sylpi sehingga peneliti menggunakan pendekatan tambahan yakni Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) yang memiliki enam prinsip yakni Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko, Efektif, serta Efisien. Kedua pendekatan tersebut kemudian digabungkan dengan cara mengelompokkan indikator yang sejenis sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Paha Sylpi secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut :

1. Transparansi

Prinsip yang pertama adalah transparansi dimana pihak yang bekerjasama harus transparan dalam memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kerjasama. Hal ini sejalan dengan prinsip Kemitraan yang ada pada KPBU karena ketika melakukan suatu kerjasama harus mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan prinsip transparansi ini sangat diperlukan. Selain itu, prinsip transparansi ini juga sesuai dengan prinsip Bersaing yang ada dalam KPBU karena pada prinsip bersaing disebutkan bahwa pemilihan partner kerjasama dilakukan melalui pemilihan yang adil, terbuka dan transparan.

Salah satu tahapan kerjasama yang membutuhkan prinsip transparansi adalah proses pemilihan partner. Proses pemilihan partner yang dilakukan pada pelaksanaan Program Paha Sylpi berdasarkan pada MoU yang dilakukan antara Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga kerjasama antara Perhutani dan Dinas Peternakan dapat terjadi. Sedangkan untuk pemilihan LMDH sendiri melalui proses survey lokasi lahan hutan yang kritis dimana hal tersebut sudah dipetakan oleh Perhutani yang kemudian dipilih lahan yang kriterianya cocok untuk diterapkan *silvopastura* yakni di Desa Setren khususnya Dusun Ngembag dimana LMDH yang ada di dusun tersebut adalah LMDH Wana Manunggal I.

Setelah ditetapkan wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi penerapan *silvopastura*, kemudian komunikasi awal dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan serta Perum Perhutani kepada masyarakat Desa Setren yang tergabung dalam LMDH Wana Manunggal I dengan cara mengadakan pertemuan dan dialog dengan masyarakat dimana dalam pertemuan tersebut sekaligus memastikan mengenai kesiapan masyarakat Desa Setren dalam melaksanakan Program Paha Sylpi. Guna menunjang pelaksanaan Program Paha Sylpi ini, pihak-pihak yang bekerjasama yakni Dinas Peternakan dan Perikanan, Perum Perhutani KPH Bojonegoro serta LMDH Wana Manunggal I menyediakan sumber daya yang dimiliki agar program dapat berjalan dengan lancar.

Pada Program Paha Sylpi ini proses bagi hasil hanya dilakukan oleh pihak Perhutani dan LMDH Wana Manunggal I. Dinas Peternakan tidak mendapatkan bagi hasil karena Dinas Peternakan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga bagi hasil ini tidak diperlukan. Apalagi, bantuan sapi yang diberikan merupakan hibah murni dari Dinas Peternakan untuk masyarakat sehingga Dinas Peternakan hanya meminta tanggung jawab dari masyarakat untuk mengelola dan menjaga sapi yang ada dan jangan sampai hilang atau dijual. Bagi hasil yang dilakukan diantara Perum Perhutani dan LMDH Wana Manunggal untuk kayu jati terdapat pembagian dengan prosentase sebesar 75% untuk Perhutani dan 25% untuk masyarakat. Pembagian tersebut dilakukan tidak dalam bentuk kayu utuh, akan tetapi setelah tahap penjualan. Sedangkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan yang lainnya, pihak perhutani tidak meminta pembagian hasil. Hasil tanaman pangan 100% untuk masyarakat yang menggarap akan tetapi dengan syarat masyarakat harus tetap bertanggung jawab untuk menjaga tanaman utama yang ada di hutan yakni pohon jati.

Teknik pelaksanaan sistem *silvopastura* sendiri adalah dengan cara melepaskan hewan ternak yang dalam hal ini adalah sapi ke hutan untuk mencari makanannya sendiri. Akan tetapi, pada pelaksanaan Program Paha Sylpi ini tidak sama dengan sistem *silvopastura* yang ada. Perbedaannya terdapat pada sistem pemberian pakan ternak. Pada sistem *silvopastura*, ternak dilepas ke hutan untuk mencari makanannya sendiri. Akan tetapi, pada Program Paha Sylpi ini ternak yang ada dikandangkan dan diberi makan oleh peternak. Perbedaan tersebut disebabkan karena rumput gajah hanya ditanam pada lahan seluas 3,6 Ha sedangkan jumlah ternak yang ada sebanyak 32 ekor. Sehingga, ketersediaan rumput gajah tidak dapat mencukupi kebutuhan pakan ternak untuk jangka waktu yang lama apabila ternak dilepas ke hutan.

2. Akuntabilitas

Prinsip kerjasama yang kedua adalah akuntabilitas dimana pihak yang melakukan kerjasama harus bertanggung jawab dalam semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan. Prinsip ini sesuai dengan prinsip Pengendalian dan Pengelolaan Resiko yang ada dalam KPBU karena dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa kerjasama dilakukan dengan penilaian resiko, pengembangan strategi pengelolaan, serta mitigasi (pencegahan) terhadap resiko yang akan terjadi.

Cara yang dilakukan ketiga pihak yang bekerjasama dalam mengoptimalkan hasil yang akan didapatkan dari Program Paha Sylpi adalah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat untuk mengelola lahan kehutanan dan peternakan yang ada, serta melakukan pengawasan aset yang dikerjasamakan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan adalah pendampingan, pengarahan, pemberian fasilitas penunjang, serta membuat jadwal penjagaan agar program Paha Sylpi dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan Program Paha Sylpi ini tentunya ketiga pihak yang terlibat harus membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil

kinerjanya. Pada Perum Perhutani, hingga sampai saat ini laporan mengenai program *silvopastura* baru akan disusun dimana nantinya laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Administratur Utama Perum Perhutani KPH Bojonegoro. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan pelaporan yang dilakukan berasal dari hasil pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat mengenai perkembangan ternak yang dihibahkan yakni tentang jumlah awal ternak, lahir, mati, tidak mau beranak (majir), dan beli lagi. Selain itu, juga ada pelaporan terkait dengan perkembangan rumput yang sudah bisa dipanen dan adanya embung yang sudah dapat difungsikan untuk mengairi lahan. Pelaporan ini dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kabupaten Bojonegoro secara lisan maupun tulisan dimana waktunya tidak ditentukan. Untuk pertanggungjawaban LMDH Wana Manunggal I sendiri adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta Perum Perhutani KPH Bojonegoro. Untuk laporannya dilakukan selama 3 bulan sekali dalam bentuk tulisan yang terkait dengan perkembangan ternak yang ada. Akan tetapi, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan juga terjun langsung untuk melakukan pengecekan sekaligus monitoring dan evaluasi.

3. Partisipatif

Prinsip kerjasama yang ketiga adalah partisipatif dimana prinsip ini harus dilaksanakan dalam bentuk konsultasi atau dialog untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut tidak luput dari peran ketiga pihak yang melakukan kerjasama. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Paha Sylpi ini adalah Perum Perhutani KPH Bojonegoro, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta masyarakat Desa Setren yang tergabung dalam LMDH Wana Manunggal I.

Pada pelaksanaan Program Paha Sylpi sendiri tentunya masing – masing aktor yang terlibat memiliki peran untuk menunjang keberhasilan program. Peran dari Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dilihat dari adanya pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat untuk mengembangkan budidaya ternak yang ada di Desa Setren. Peran dari Perum Perhutani adalah sebagai penyedia lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi penerapan *silvopastura*. Sedangkan peran dari LMDH Wana Manunggal I adalah sebagai pelaksana program dimana masyarakat yang tergabung dalam LMDH Wana Manunggal I melakukan penanaman di kawasan hutan, merawat ternak, serta melakukan penjagaan terhadap aset-aset yang dikerjasamakan.

4. Efisiensi

Prinsip kerjasama yang keempat adalah efisiensi, prinsip ini harus dipertimbangkan ketika akan melaksanakan suatu kerjasama. Prinsip ini sejalan dengan prinsip efisien pada KPBU dimana disebutkan bahwa efisiensi ini merupakan upaya yang dilakukan agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan sumber daya yang minimal.

Sumber daya yang dimaksud pada pelaksanaan Program Paha Sylpi adalah lahan kehutanan dan peternakan yang disediakan oleh Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan Dinas Peternakan dan

Perikanan. Penerapan program Paha Sylpi ini dapat mengembalikan produktivitas lahan kehutanan serta meningkatkan produktivitas sapi. Hal tersebut dapat terjadi karena pengelolaan lahan serta sapi akan lebih maksimal ketika program Paha Sylpi diterapkan karena melibatkan peran masyarakat didalamnya. Selain itu, penerapan Program Paha Sylpi ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola lahan kehutanan yang ada bahkan dapat merubah pola kebiasaan masyarakat yang sebelumnya hanya memberikan jerami sebagai pakan ternak menjadi beralih memberikan rumput gajah. Upaya yang dilakukan untuk memantau jalannya Program Paha Sylpi ini dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

5. Efektifitas

Prinsip kerjasama yang kelima adalah efektifitas dimana efektifitas ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan karena dalam melakukan suatu kerjasama, program yang dibuat harus dapat diukur keberhasilannya dengan cara membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil nyata yang diperoleh. Prinsip tersebut senada dengan prinsip Efektif yang terdapat dalam KPBU.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Paha Sylpi adalah :

- a. Meningkatkan produktivitas lahan hutan yang kritis dimana hal ini dapat diketahui dari berkurangnya lahan hutan yang kritis di Desa Setren yang awalnya 28,6 Ha menjadi 16,6 Ha.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pembangunan hutan. Peran masyarakat sendiri adalah melakukan perawatan serta penjagaan terhadap aset kehutanan yang ada agar kelestarian hutan tetap terjaga.
- c. Mengurangi resiko kegagalan pembangunan hutan yang selama ini hanya ditanggung sendiri oleh Perum Perhutani. Dengan memberikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk mengelola dan menjaga hutan maka secara tidak langsung masyarakat akan melakukan suatu upaya agar dapat memenuhi tanggungjawab yang diberikan oleh Perhutani.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat sekitar hutan. Hal ini dapat terjadi karena dengan penerapan Program Paha Sylpi dalam jangka waktu yang panjang akan tercipta peluang usaha di bidang peternakan maupun kehutanan seperti usaha pengembangbiakan hewan ternak, terbentuknya industri di bidang pakan ternak, pengolahan produk hewan, dan pupuk organik sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
- e. Mendukung program pemerintah pusat yang terkait dengan kedaulatan pangan dan daging nasional.

Sampai sejauh ini, dengan adanya Program Paha Sylpi di Dusun Ngembag perubahan dapat dirasakan di sektor peternakan, kehutanan, serta perekonomian masyarakat. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan Program Paha Sylpi ini sendiri juga telah tercapai bahkan hingga menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

6. Konsensus

Prinsip kerjasama yang keenam adalah konsensus dimana pada pelaksanaan kerjasama harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang bekerjasama dapat menyetujui keputusan yang dibuat. Konsensus ini berupa kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang melakukan kerjasama. Pelaksanaan Program Paha Sylpi ini ada karena terdapat permasalahan yang terjadi di sektor kehutanan dan sektor peternakan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan permasalahan yang terjadi, mengharuskan pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Perum Perhutani harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut kemudian, ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU Nomor 16/MOU/DIR/2015 dan Nomor 188/07/412.11/2015 Tentang Sinergitas Dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dimana MoU ini merupakan dasar yang digunakan sehingga Program Paha Sylpi ini dapat lahir. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Program Paha Sylpi ini seharusnya terdapat kontrak kerjasama dalam bentuk penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS). Akan tetapi, hingga saat ini dokumen tersebut masih dalam tahap proses penyusunan. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan program karena PKS ini merupakan suatu bukti yang sangat kuat bahwa kerjasama Program Paha Sylpi memang dilakukan di Desa Setren dan peran aktor yang terlibat juga dapat diketahui dengan baik.

Selain itu, kesepakatan juga dilakukan untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program. Pada Program Paha Sylpi sendiri, selama program ini diterapkan kendala yang terjadi diantaranya (1) Tidak semua ternak yang dihibahkan kepada masyarakat produktif. Hal tersebut dikarenakan ternak yang diberikan memiliki perbedaan umur. (2) Minimnya air yang digunakan untuk mengairi lahan kehutanan terutama pada saat musim kemarau. (3) Rencana penempatan kandang yang lokasinya cukup jauh dari LMDH Wana Manunggal I sehingga keamanannya juga tidak dapat terjamin.

Upaya yang dilakukan ketiga pihak yang bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut antara lain (1) Menukarkan ternak yang tidak produktif atas persetujuan Dinas Peternakan dan Perikanan beserta semua pihak yang bekerjasama. (2) Perum Perhutani mengusulkan pembangunan embung atau tempat penampungan air kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan hal tersebut kemudian diwujudkan dengan pembangunan embung seluas 25 x 100 meter yang terletak di sebelah utara kandang sapi. Pembangunan embung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan salah satu bentuk penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang terdapat dalam KPBU. (3) Untuk masalah lokasi penempatan kandang dilakukan survey guna menemukan lokasi yang sesuai. Koordinasi yang dilakukan diantara ketiga pihak yang bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah koordinasi yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan Program Paha Sylpi ini akan dilakukan secara berkelanjutan karena program ini merupakan program jangka panjang.

Program ini juga akan direplikasi atau di terapkan di kawasan lainnya.

7. Saling Menguntungkan dan Menghargai

Prinsip yang terakhir adalah saling menguntungkan dan menghargai. Prinsip ini harus dipegang teguh ketika melaksanakan suatu kerjasama. Prinsip ini merupakan landasan untuk membuat suatu keputusan atau mekanisme kerjasama. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan yang terdapat dalam KPBU dimana dalam prinsip kemanfaatan disebutkan bahwa kerjasama dilakukan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada pelaksanaan Program Paha Sylpi ini ketiga pihak yang melakukan kerjasama tidak pernah merasakan kerugian bahkan banyak manfaat yang didapatkan. Manfaat sosial yang dapat dirasakan selama pelaksanaan Program Paha Sylpi adalah (a) Ketersediaan pakan ternak dapat tercukupi dengan adanya penanaman hijauan pakan ternak pada lahan kehutanan yang ada. (b) Dapat mempercepat hewan ternak dalam bereproduksi karena pakan yang diberikan segar dan berkualitas. (c) Dapat memenuhi kebutuhan daging untuk masyarakat. (d) Masyarakat dapat mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik. (e) Kelestarian dan keamanan hutan dapat terjaga.

Sedangkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan selama Program Paha Sylpi dilaksanakan adalah :

- Memperoleh pupuk yang berasal dari kotoran sapi yakni sekitar 40 kg/hari dengan perkiraan harga Rp. 1000,- per kilogramnya atau Rp. 40.000/hari.
- Kebutuhan daging sapi dapat terpenuhi dengan harga daging yang relatif stabil.
- Pengembangan ternak inti plasma. Ternak inti plasma sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh peternak inti dengan peternak kecil yang memiliki sedikit modal.
- Terbukanya peluang untuk pengembangan usaha pembangbiakan (*breeding*) ternak dalam kawasan hutan.
- Terbentuknya industri yang berkaitan dengan pakan ternak, daging, kulit, tulang, dan pupuk organik yang berasal dari peternakan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
- Meningkatnya kesuburan lahan hutan yang akan berpengaruh pada produktifitas jati karena mendapatkan pemupukan secara berkala.
- Diperoleh tegakan hutan yang dapat dipanen pada umur 10 tahun dengan produksi 100 m³/Ha.
- Peningkatan tambahan penghasilan masyarakat baik penghasilan jangka panjang (panen jati), jangka menengah (panen anakan sapi) dengan perkiraan harga Rp. 12.000.000,- per ekor dalam waktu satu tahun, dan jangka pendek (panen tanaman pangan yang ditanam di sela pohon jati) dengan perkiraan harga sebesar Rp. 9.000.000,- per lima bulan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan peneliti, pada kerjasama yang dilakukan oleh Dinas

Peternakan dan Perikanan, Perum Perhutani KPH Bojonegoro, serta LMDH Wana Manunggal I dalam pengelolaan hutan melalui Program Paha Sylpi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut berjalan dengan baik. Penelitian ini dijabarkan menggunakan tujuh prinsip kerjasama menurut Keban (2009) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi, Efektifitas, Konsensus serta Saling Menguntungkan dan Menghargai.

Dilihat dari prinsip transparansi dapat dijabarkan bahwa proses pemilihan partner yang dilakukan diantara Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Perum Perhutani KPH Bojonegoro berdasarkan pada MoU. Sedangkan untuk LMDH dilakukan melalui proses survey lokasi lahan hutan yang kritis dimana lahan yang kritis sudah dipetakan oleh Perum Perhutani kemudian dipilih lahan yang kriterianya cocok yakni di Desa Setren. Selanjutnya, terdapat komunikasi awal yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dan dialog dengan masyarakat dimana dalam pertemuan tersebut sekaligus memastikan mengenai kesiapan masyarakat Desa Setren dalam melaksanakan Program Paha Sylpi. Masing-masing pihak kemudian menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kelangsungan pelaksanaan program Paha Sylpi. Bagi hasil hanya dilakukan diantara Perum Perhutani dan LMDH Wana Manunggal I. Namun, dalam pelaksanaan Program Paha Sylpi ini terdapat sedikit perbedaan dengan teknik *silvopastura* dimana perbedaannya terdapat pada sistem pemberian pakan ternak. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan hijauan pakan ternak tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang apabila ternak dilepaskan ke hutan.

Selanjutnya, pada prinsip akuntabilitas dijabarkan bahwa ketiga pihak yang bekerjasama memiliki cara dan bentuk pertanggungjawaban tersendiri untuk mengoptimalkan hasil dari Program Paha Sylpi. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Perum Perhutani berupa pendampingan dan pengarahan pada saat penanaman, Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan fasilitas untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik, sedangkan LMDH Wana Manunggal I melakukan penjagaan aset yang dikerjasamakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kinerjanya, pihak - pihak yang bekerjasama harus membuat laporan terkait perkembangan program Paha Sylpi.

Kemudian, pada prinsip partisipatif dijabarkan bahwa Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Paha Sylpi ini adalah Perum Perhutani KPH Bojonegoro, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta masyarakat Desa Setren yang tergabung dalam LMDH Wana Manunggal I. Ketiga aktor tersebut memiliki peran masing-masing untuk mencapai tujuan dari program Paha Sylpi.

Pada prinsip efisiensi dijabarkan bahwa Penerapan program Paha Sylpi dapat mengembalikan produktivitas lahan kehutanan serta meningkatkan produktivitas sapi. Hal tersebut dapat terjadi karena pengelolaan lahan serta sapi akan lebih maksimal ketika program Paha Sylpi diterapkan karena melibatkan peran masyarakat didalamnya. Upaya yang dilakukan untuk memantau jalannya Program Paha Sylpi ini adalah pihak Dinas

Peternakan dan Perikanan serta Perum Perhutani KPH Bojonegoro adalah selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Sedangkan pada prinsip efektifitas dapat dijabarkan bahwa penerapan Program Paha Sylpi di Dusun Ngembag ini dapat memberikan perubahan di sektor peternakan, kehutanan, serta perekonomian masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan Program Paha Sylpi ini sendiri juga telah tercapai bahkan hingga menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

Selanjutnya, pada prinsip konsensus dapat dijabarkan bahwa pelaksanaan kerjasama pada Program Paha Sylpi ini dilandasi oleh MoU yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro dengan Direktur Utama Perum Perhutani dimana pada pelaksanaannya harus terdapat perjanjian kerjasama (PKS) untuk dijadikan sebagai bukti bahwa kerjasama Program Paha Sylpi dilaksanakan. Akan tetapi, hingga saat ini PKS untuk program Paha Sylpi ini masih dalam tahap proses. Selain itu, pada prinsip ini juga dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program sehingga dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi diantara ketiga pihak yang bekerjasama. Koordinasi yang dilakukan diantara ketiga pihak yang bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan Program Paha Sylpi ini akan dilakukan secara berkelanjutan karena program ini merupakan program jangka panjang. Program ini juga akan direplikasi atau di terapkan di kawasan lainnya.

Prinsip yang terakhir adalah saling menguntungkan dan menghargai yang dapat dijabarkan bahwa Penerapan Program Paha Sylpi ini dapat memberikan manfaat baik itu dari segi ekonomi maupun sosial. Selain itu, selama pelaksanaan program Paha Sylpi ini ketiga pihak yang bekerjasama tidak merasakan kerugian dengan banyaknya manfaat yang diperoleh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti memiliki saran yang dapat berguna agar kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, Perum Perhutani KPH Bojonegoro, dan LMDH Wana Manunggal I dapat lebih baik lagi kedepannya. Saran tersebut diantaranya :

1. Harus ada penambahan luas lahan yang digunakan sebagai media tanam hijauan pakan ternak (rumput gajah) yang saat ini hanya seluas 3,4 Ha. Hal tersebut dikarenakan jumlah sapi yang dibudidayakan akan selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga harus diiringi pula dengan peningkatan ketersediaan lahan hijau agar kebutuhan pakan ternak dapat terpenuhi setiap saat.
2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) harus segera dibuat agar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Paha Sylpi dapat diketahui dengan jelas peran serta tanggung jawab yang dimiliki. Terutama untuk pihak LMDH Wana Manunggal I karena ketika kerjasama ini hanya

berlandaskan pada MoU maka peran dari LMDH akan dipertanyakan. Hal tersebut karena dalam MoU pihak yang bekerjasama hanyalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Perum Perhutani.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 ilmu administrasi negara FISH Unesa,
- b. M. Farid Ma'ruf S.sos, M.AP. selaku dosen pembimbing dan penelaah jurnal yang ditulis peneliti
- c. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si., dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA. selaku dosen penguji,
- d. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Intan dan M. Farid Ma'ruf. 2016. *Kerjasama Perum Perhutani KPH Jombang dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. 2011. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*. Surabaya
- Keban, Yeremias T. 2009. *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi : Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip*
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Toolkit KPB
Online. <http://ppptoolkit.or.id/tahapan-kpbu.html> Diakses Tanggal 12 September 2017
- Utama, Dwinanta. 2010. *Prinsip dan Strategi Penerapan "Public Private Partnership" Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi*. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Volume 12 Nomor 3
- Utomo, Tri Widodo W. 2004. *Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dengan Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Daerah*. Bahan Diskusi Pada "Diklat Manajemen Pemerintahan" Bagi Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
- W, Desy Debrilianawati, Choirul Saleh dan Minto Hadi. 2002. *Peran dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan*. Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 2